

352

WAR

P

1993



## LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL :  
**PERANAN PEMDA KODIA SEMARANG  
DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN**

OLEH :  
Dr. Esmi Warassih, SH.MS  
DKK

Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro  
Semarang 1994

---

Dibiayai Oleh DIP Operasi dan Perawatan Fasilitas  
UNDIP No. 172 A/PT09/OP/A/1993 Tanggal 2-8-1993

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

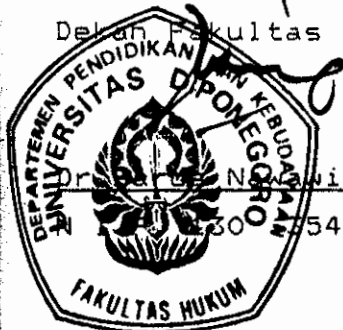
1. a. Judul Penelitian : Peranan Pemda Kodia Semarang  
Dalam Menanggulangi Kemiskinan
- b. Macam Penelitian : (e) Dasar ( ) Terapan  
(x) Pengembangan
- c. Kategori : I/II/III
  
2. Kepala Proyek Penelitian :
  - a. Nama lengkap : Dr. Esmi Warassih SH. MS.
  - b. Jenis kelamin : Perempuan
  - c. Pangkat/gol/NIP : Pembina Tk II/IV b/130 529 436
  - d. Jabatan sekarang : Lektor Kepala Madya  
Kajur Hukum dan Pembangunan
  - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Hukum dan Pembangunan
  - f. Universitas : Universitas Diponegoro
  - g. Bidang ilmu yang diteliti: Sosial (Humaniora)
  
3. Jumlah Tim Peneliti : 4 orang
4. Lokasi Penelitian : Kotamadia Semarang
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp 1.200.000,-  
(Satu juta dua ratus ribu rp)
7. Dibiayai melalui Proyek : OPF UNDIP Th. 1993/1994

Mengetahui :

Semarang, 20 february 1994

Dekan Fakultas Hukum

Kepala Proyek Penelitian



Dr. Boedhi Darmojo A., SH

Dr. Esmi Warassih, SH. MS.

N I P. 130 54 519

N I P. 130 529 436

Mengetahui:

Ketua Lemlit UNDIP

Prof.dr.R.Boedhi Darmojo

N I P. 130 431 357

## RINGKASAN

Penelitian yang berjudul "Peranan Pemda Kodya Semarang dalam menanggulangi kemiskinan" ini berusaha mengungkap problematika kemiskinan, khususnya yang terjadi di Kodya Semarang. Penelitian ini berusaha mengungkap sebab-sebab terjadinya kemiskinan, asumsi-asumsi yang dipakai oleh Pemda Kodya Semarang dalam mendekati masalah kemiskinan serta langkah-langkah yang telah diambil dalam usaha memerangi kemiskinan di wilayah ini.

Penelitian ini mengambil sampel Instansi Pemerintah, yaitu Bappeda dan Dinas Sosial Kodya Semarang yang terkait langsung dengan pendataan dan penanganan masalah kemiskinan di Wilayah Pemda kodya Semarang. Populasi penelitian ini adalah Pemda Dati II Kodya Semarang.

Dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial penduduk masih menjadi problem yang serius, khususnya masalah kemiskinan. Di wilayah Kodya Semarang terdapat 42.017 jiwa lebih yang hidup dibawah garis kemiskinan, yang tersebar di 177 Kelurahan pada 16 Kecamatan.

Usaha penanganan masalah kesejahteraan sosial (Kemiskinan), sebenarnya terkait dengan proses pembangunan itu sendiri. Selama PJPT I banyak program yang dilaksanakan, baik program sektoral, regional maupun program khusus. Sedangkan untuk Repelita VI ini penanganan masalah kemiskinan dilakukan melalui program IDT yang ditunjang dengan program sektoral dan program-program khusus lainnya.

## ABSTRACT.

This research entitled the role of Pemda Kodia Semarang in dealing with poverty is trying to get rent poverty problems, particularly those taking place in Kodia, Semarang. This research attempt to reveal causes of poverty occurrence, assumptions used by Pemda Kodia Semarang to approach poverty problems and the measures adopted to wipe out poverty in this district.

From datas assembled, we try to process, analyze and finally draw a conclusion. Based on the results of this research and its conclusion, we propose some suggestions if we feel necessary.

The results of this research are hope to be able to give inputs to government, especially to Pemda Kodia Semarang in trying to coping with poverty for next time.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia yang telah dilimpahkannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian dengan judul " Peranan Pemda Kodya Semarang Dalam Menanggulangi Kemiskinan " ini dapat terlaksana atas biaya dari dana DIP Proyek DFF Undip, dan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penelitian ini mencoba mengungkap apa, mengapa dan bagaimana masalah kemiskinan di Kodya Semarang, yang saat ini sedang isu central dan sedang diusahakan pengentasannya, bahkan dalam skala Nasional.

Untuk dapat terlaksananya penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini ingin disampaikan ucapan terima kasih yang mendalam serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Pimpinan Lembaga Penelitian Undip yang telah memberikan kepercayaan kepada kami.
- kepala beserta Staf BAPPEDA Tk. II Kodya Semarang, cabang Dinas Sosial Kodya Semarang, Pemda Kodya Semarang.
- Dekan Fakultas Hukum Undip.
- Rekan-rekan anggota peneliti.
- Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan.

Akhirnya semoga penelitian ada manfaatnya bagi pembaca dan masyarakat yang membutuhkan serta sekaligus dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada.

Semarang, Februari 1994

Tim Peneliti

## DAFTAR TABEL.

1. Keadaan Penduduk Semarang Menurut Kelompok Umur .....	12
2. Tabel Kepadatan Penduduk - Kodia Semarang .....	13
3. Tabel Mata Pencaharian Penduduk .....	14
4. Tabel Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kodia Dati II Semarang .....	16
5. Tabel Peluncuran Dana Pengentasan Kemiskinan ....	22

## DAFTAR ISI

Lembar Identitas	
- Ringkasan.....	i
- Summary.....	ii
- Kata Pengantar.....	iii
- Daftar Tabel.....	iv
- Daftar Isi.....	v
BAB I. Pendahuluan.....	1
BAB II. Tinjauan Pustaka.....	4
BAB III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian....	8
BAB IV. Metodologi Penelitian.....	9
BAB V. Hasil Penelitian dan Pembahasan... 11	11
A. Gambaran Umum Daerah.....	11
B. Masalah-masalah yang dihadapi.....	14
C. Peta Kemiskinan.....	17
D. Pengentasan Kemiskinan.....	19
E. Hambatan-hambatan.....	23
F. Peranan Hukum.....	25
G. Organisasi IDT Kodya Semarang.....	26
BAB VI. PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran-saran.....	28

## BAB I PENDAHULUAN

Berbagai tolok ukur, tersedia untuk menentukan tingkat perkembangan suatu negara. Dari tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhannya; tingkat kematian anak dan laju pertumbuhan penduduk; tingkat ketersediaan berbagai kebutuhan pokok mulai dari sandang-pangan-papan, sampai sekolah-dokter-obat dan seterusnya.

Indikator-indikator itu perlu dipertimbangkan, jika ingin mengetahui sudah sampai seberapa jauh, misalnya, keberhasilan pembangunan di Indonesia. Karena hakekat pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, maka ini berarti pertama-tama mengurangi, kalau dapat menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat. Karena itu dari waktu ke waktu perlu disimak seberapa jauh keberhasilan pembangunan itu dilihat dari sisi pemberantasan kemiskinan.

Soemitro Djojohadikoesoemo dalam sidang pleno ke-VI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (IESEI) di Bukittinggi Sumatera Barat; mengatakan bahwa tingkat kehidupan rata-rata bangsa Indonesia selama dua dasa warsa (empat kali pelita) telah mengalami kenaikan lebih dari dua setengah kali lipat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan semakin menurun jumlahnya. Menurunnya jumlah penduduk miskin secara nasional dari 70 juta jiwa (60 %) pada tahun 1970, lalu turun menjadi 47,2 juta (1978), lalu menjadi 40,6 juta (1981), 30 juta (1987) dan sekarang diperkirakan tinggal 27,2 juta (1990) dari jumlah penduduk yang kurang lebih 180 juta jiwa; adalah merupakan hasil pelaksanaan berbagai program pembangunan di seluruh wilayah tanah air, termasuk di dalamnya keberhasilan pembangunan di wilayah Semarang dan Jawa Tengah.

Harus diakui bahwa semangat dan Political Will pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan akhir-akhir



ini semakin kuat. Hal ini terbukti ketika Presiden Soeharto dalam suatu kesempatan pidato kenegaraan, mengemukakan isu kemiskinan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi kepada 14 menteri Kabinet Pembangunan VI, untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Bahkan sekarang di Bappenas telah duduk asisten menteri yang khusus menangani masalah Kebijakan (Policy) dan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi semangat saja belum cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Tanpa kesiapan dan kecakapan untuk menguasai masalah yang sebenarnya, untuk kemudian dipecahkan secara sistematis dan terprogram secara nasional, maka hasil yang akan diperoleh tidak akan memuaskan.

Jika Political Will pemerintah untuk memerangi kemiskinan ini hendak ditindaklanjuti secara terprogram, maka paralel dengan proses desentralisasi dan otonomi daerah yang tengah dikembangkan saat ini, maka program pengentasan (pemberantasan) kemiskinan ini perlu menggunakan instrumen birokrasi daerah, baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun (terutama) Pemerintah Daerah Tingkat II, dengan partisipasi yang luas dari berbagai kalangan swasta maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang bersifat multi dimensi, maka diperlukan kebijaksanaan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat dengan kegiatan yang terpadu dan terarah. Disamping itu diperlukan sikap untuk memperlakukan orang miskin, baik sebagai obyek maupun subyek dalam mengangkat kehidupan mereka.

Sesuai dengan alur pemikiran yang dikemukakan di atas, maka peranan pemerintah daerah (dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Tingkat II) akan semakin besar atau penting. Dalam kaitan ini ingin diteliti peranan Pemerintah Daerah Kodis Semarang dalam menanggulangi problem kemiskinan di wilayahnya. Sejalan dengan proses desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin

besar. (Dati II), maka penelitian mengenai seberapa jauh peranan Dati II dalam mengganggu kemiskinan di daerahnya adalah sangat relevan dan penting.